

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hasil-Hasil Kongres XXX

Mukhtar, Sidratahta. (2006). *HMI dan Kekuasaan*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Solichin. (2010). *HMI Candradimuka Mahasiswa*. Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation.

Fikri, Mhd Zakiul. (2018). *Di Bawah Naungan Khittah Perjuangan HMI*. Yogyakarta: Istana Media

Tarigan, Azhari Akmal. (2007). *Islam Mazhab HMI*. Jakarta: Kultura GP Press Group

Kurniawan, J Luthfi dan Hesti Puspitosari. (2012). *Negara, Civil Society, dan Demokratisasi*. Malang: Intrans Publishing

Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Winarno, Budi. (2020). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Media.

Suswanto, Gunawan. (2016). *Mengawal Penegak Demokrasi Dibalik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Jurnal

- Nur, Askar, Zulkifli Makmur. 2020. Implementasi Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam: Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani. *Jurnal Khittah*. Vol. 1(1): 9
- Susanti. 2020. Peran Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 12(2): 15
- Cahyono, Habib. Peran Mahasiswa di Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*. Vol. 12(1): 37
- Syahril, Sulthon. 2019. Teori-Teori Kepemimpinan. *Jurnal Ri'ayah*. Vol. 04(02):209
- Setiawan, Anang , Erinda Alfiani Fauzi. 2019. Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*. Vol.1 (1): 11.
- Rizki, Singgih Choirul, Yusuf Adam Hilman. 2020. Menakar perbedaan opini dalam agenda pelaksanaan kontestasi Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*. Vol.4 (2):153
- Utomo, Wahyu Wiji. 2020. Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Mengatasi Pilkada di tengah Covid 19 dan New Normal. *Jurnal Al-Harakah*. Vol. 3 (1):38

Skripsi

- Prasetyo, Eko.2013. *Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik di Indonesia (pemikiran politik politisi muda:Yuddy Chrisnandi, M.Fajroel Rachman, Budiman Sudjatmiko, dan Fadli Zon)*.Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Internet

Aveecena.com. Diakses dari <https://aveecena.com/>

Kompas.com. 2019. “*Merakyat, Gaya Kepemimpinan Jokowi*”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/09/15015521/merakyat-gaya-kepemimpinan-jokowi>

Kominfo.go.id. 2020. “*Pelaksanaan pilkada serentak relatif aman, Mendagri apresiasi kerja keras semua pihak*”. Diakses dari kominfo.go.id/content/detail/31512/pelaksanaan-pilkada-serentak-relatif-aman-mendagri-apresiasi-kerja-keras-semua-pihak/0/pemilihanserentak

Merdeka.com. 2021. “*Sejarah 5 Februari: Lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam, Ormawa Tertua di Indonesia*”. Diakses dari <https://www.merdeka.com/jateng/sejarah-5-februari-lahirnya-himpunan-mahasiswa-islam-ormawa-tertua-di-indonesia>

Antaraneews.com. 2017. “*Literasi masyarakat kunci penggunaan media sosial sehat*”. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/656945/literasi-masyarakat-kunci-penggunaan-media-sosial-sehat>

Health.detik.com. 2020. “*Perhimpunan RS Indonesia Jelaskan Penyebab Variasi Tarif Rapid Test*”. Diakses dari <https://health.detik.com/d-5091286/perhimpunan-rs-indonesia-jelaskan-penyebab-variase-tarif-rapid-test>

Idntimes.id. 2020. “*Aveecena Gandeng HMI Lakukan Program Rapid Test Gratis untuk Medis dan Relawan*”. Diakses dari <https://ideatimes.id/aveecena-gandeng-hmi-lakukan-program-rapid-test-gratis-untuk-medis-dan-relawan/>

Kompas.com. 2022. “*2 Maret 2020, Saat Indonesia pertama kali dilanda Covid-19*”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/2-maret-2020-saat-indonesia-pertama-kali-dilanda-covid-19>

Covidcare.id. 2021. “*Panic Buying di Masa Pandemi Covid-19*”. Diakses dari <https://covidcare.id/artikel/panic-buying-di-masa-pandemi-covid-19>

Detik.com. 2020. “*Ini Opsi Tanggal Pelaksanaan Pilkada 2020 Yang Ditunda Gegara Corona*”. Diakses dari [https://news.detik.com/ ini-opsi-tanggal-pelaksanaan-pilkada-2020-yang-ditunda-gegara-corona](https://news.detik.com/ini-opsi-tanggal-pelaksanaan-pilkada-2020-yang-ditunda-gegara-corona)

Dpr.go.id. 2020. “*Angota DPR Tepis Wacana penundaan pilkada serentak 2020*”. Diakses dari [https:// www.dpr. go.id/berita/A nggota+DPR+Tepis+Wacana+Penundaan+Pilkada+Serentak+2020](https://www.dpr.go.id/berita/Anggota+DPR+Tepis+Wacana+Penundaan+Pilkada+Serentak+2020)

Tempo.co. 2020. “*Masyarakat Dukung Pilkada Serentak 2020 Ditunda*”. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/masyarakat-dukung-pilkada-serentak-2020-ditunda>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

**Narasumber Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si (Sekretaris Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden Republik Indonesia)**

No.	Pertanyaan
1.	Mengapa pada akhirnya pemerintah menunda pelaksanaan pilkada dan menetapkan 9 Desember sebagai tanggal pelaksanaannya? Mengapa tidak tanggal lainnya?
2.	Tujuan utama apa yang ingin dihasilkan oleh pemerintah dari pelaksanaan Pilkada tahun 2020?
3.	Dari hasil pelaksanaan Pilkada tahun 2020, apakah tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah sudah tercapai?
4.	Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan tanggal pasti pelaksanaan Pilkada tahun 2020?
5.	Kapan waktu pembahasan antar lembaga dilakukan dalam menetapkan waktu pasti pelaksanaan Pilkada tahun 2020? Apakah sekali atau beberapa kali dilakukan pembahasan?
6.	Apakah pemerintah sudah memiliki atau menyiapkan pedoman protokol kesehatan yang pasti untuk meminimalisir angka penyebaran virus Covid-19 di masyarakat karena pelaksanaan Pilkada tahun 2020?
7.	Bagaimanakah pandangan pemerintah melihat kondisi masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerahnya sehingga memantapkan pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020?
8.	Peran penting apa yang dipegang oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam kebijakan Pilkada tahun 2020?

Narasumber Yusa' Farchan, S.Sos., M.Si (Pengamat Politik)

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimanakah pelaksanaan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2020?
2.	Bagaimana kondisi sosial di masyarakat era pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2020?
3.	Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pelaksanaan pilkada sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat?
4.	Siapa saja aktor yang berpengaruh dalam penetapan kebijakan pilkada tahun 2020 selain Presiden?
5.	Seberapa besar pengaruh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah?
6.	Apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19?
7.	Apa yang menjadi indeks keberhasilan dari suatu pemerintahan?
8.	Apa yang menjadi catatan penting untuk pemerintahan Joko Widodo selama setahun pemerintahannya di tahun 2020?

**Narasumber Arya Kharisma Hardy (PJ Ketua Umum Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam 2018-2020)**

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana sejarah berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam?
2.	Apakah yang menjadi tujuan serta visi dan misi HMI dalam perjalanan organisasinya?
3.	Peran penting apa yang dipegang oleh Himpunan Mahasiswa Islam dalam menjalankan fungsinya sebagai agent of social control?
4.	Sejauh mana keterlibatan HMI dalam merespon setiap aktivitas pemerintah di tahun 2020?
5.	Bagaimanakah pandangan HMI terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19?
6.	Bagaimana pandangan HMI akan adanya perbedaan pandangan yang terjadi di masyarakat akibat dari pelaksanaan pilkada 2020?
7.	Apa sikap yang dilakukan HMI sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah terkait kebijakan pilkada 2020?
8.	Bagaimana cara HMI dalam mengontrol kondisi di masyarakat agar tetap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah?
9.	Apakah cara yang dilakukan HMI dalam mengontrol kondisi sosial dimasyarakat berhasil?
10.	Sejauh mana tingkat keberhasilan HMI dalam mempengaruhi pemerintah untuk tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan masyarakat?

Data Informan

1. Nama : Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si.
Domisili : Jakarta
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden Republik Indonesia
Tanggal Wawancara : 30 Agustus 2022
2. Nama : Yusa Farchan, S.Sos., M.Si
Domisili : Cibubur
Pekerjaan/Jabatan : Pengamat Politik Citra Institute dan Ketua
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Sutomo.
Tanggal Wawancara : 10 April 2022
3. Nama : Arya Kharisma Hardy
Domisili : Jakarta
Pekerjaan/Jabatan : PJ Ketua Umum PB HMI 2018-2020
Tanggal Wawancara : 23 April 2022

Transkrip Wawancara

Subjek : Yusa Farchan, S.Sos., M.Si

Tanggal : 10 April 2022

Lokasi : Sekretariat Yayasan Citra Adhikari Nusantara

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 ?

Jawab : Secara umum banyak catatan dan evaluasi terutama bidang politik dan bidang hukum sekalipun kemarin indeks demokrasi kita naik yang baru dirilis oleh beberapa lembaga pemerintahan tingkat nasional tapi sebetulnya kan muncul ironi dan itu sebetulnya atmosfernya mulai tidak kita rasakan di periode kedua bapak Jokowi dan Maruf Amien. Kalau kita bicara dalam konteks tahun 2020 sebetulnya banyak pr terutama dalam bidang politik dan hukum ya, nah 2020 kemarin kan kita disuguhkan dalam bidang politik ini ada pelaksanaan pemilu kepala daerah yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Sekalipun secara umum ini banyak ahli politik kan mengklaim bahwa pelaksanaan pilkada kemarin cukup sukses ya dengan beberapa indikator dan dianggap memang secara umum berhasil karena dilakukan ditengah pandemi covid, tapi kalau kita melihat secara kritis sebetulnya kan pelaksanaan pilkada di 9 Desember

2020 kemarin itu kan sebetulnya merefleksikan kehendak kepentingan elite daripada kepentingan publik secara luas. Kenapa demikian paling tidak ada dua argumentasi mendasar ya, pertama, dari perspektif elite tentu kita harus melihat bahwa pilkada ini kan harus kita baca dalam konteks arus kas masuk. Arus kas masuk yang saya maksud adalah semua partai politik ini berpotensi mendapatkan logistik daripada kandidat kepala daerah sehingga momentum pilkada mau tidak mau wajib dan harus dilaksanakan karena sekali diundur berarti momentum arus kas masuk itu menjadi hilang atau menjadi tertunda kalau pilkadanya juga ditunda, jadi singkat kata bahwa momentum emas bagi partai politik tersebut itu tidak perlu dihilangkan sehingga memang kita bisa melihat bagaimana sikap elite politik untuk memaksakan pilkada meskipun saat itu situasi covid kita kan sedang sangat tinggi sekali ya masyarakat yang terkonfirmasi positif covid. Nah yang kedua, tentu dari perspektif kandidat kepala daerah juga kan dihadapkan pada situasi yang dilematis mereka sudah menempuh proses kandidasi atau pencalonan yang bahkan dimulai sejak tahapan awal pilkada, nah tiba-tiba di tengah ini kalau diundur juga kan memunculkan problem tersendiri bagi mereka jadi cost yang telah mereka keluarkan terancam mubazir atau hilang kalau pilkadanya tidak jadi dilaksanakan. 2 argumentasi mendasar itulah kemudian saya bisa simpulkan bahwa sebetulnya pilkada 2020 itu lebih merefleksikan kehendak kepentingan elite daripada kepentingan publik secara luas, karena apa? Karena saat itu juga beberapa civil society ya teman-teman NU, teman-teman

Muhamadiyah, teman-teman Ormas yang lain ini mayoritas menolak pilkada 2020. Sekarang terbalik, pemerintah sepertinya masih bersikeras pemilu diundur sementara masyarakat menginginkan pemilu tetap di 2024 jadi keadaanya relatif terbalik saat ini.

2. Bagaimana kondisi sosial di masyarakat era Pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2020?

Jawab : Ya secara umum banyak catatan tadi ya, kalau kita mengacu pada indeks demokrasi kita atmosfer yang kita rasakan hari ini kan memang ada penurunan terutama menyangkut kebebasan sipil, kita lihat beberapa aksi teman-teman mahasiswa kan lebih banyak disikapi secara represif oleh rezim atau oleh negara sehingga memunculkan situasi yang tidak bersahabat terkait dengan ekspresi kebebasan sipil itu atmosfer yang kita rasakan sekalipun dihadapkan pada temuan survei misalnya yang mengklaim bahwa justru kehidupan atau kebebasan sipil relatif lebih meningkat. Ya menurut saya justru inilah paradoksnya, ironinya disitu, jadi kita sendiri pun kan bisa merasakan itu betapa orang sangat takut sekali untuk mengekspresikan pendapat terutama di medsos dengan ancaman UU ITE, dengan ancaman pidana dan lain sebagainya sehingga membuat orang menjadi takut sementara kita sudah menikmati periode reformasi itu sejak 1998 sampai hari ini. Nah mestinya ini yang menjadi catatan terutama buat pak presiden jokowi kalau memang beliau punya komitmen yang utuh, yang kuat terhadap agenda rekonsolidasi demokrasi.

3. Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pelaksanaan pilkada sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat?

Jawab : Ya begini memang kita melihatnya harus secara objektif ya, momentum politik itu memang memberikan efek terutama sektor ekonomi, kita sudah tahu bahwa pilkada berarti ada aliran uang bukan hanya APBD atau APBN tetapi juga logistik para kandidat itu yang punya efek terhadap pertumbuhan ekonomi sekalipun sedikit atau sekalipun tidak terlalu signifikan tetapi itulah yang bisa dirasakan masyarakat karena ini menang sudah menjadi semacam budaya politik bahwa kandidat kepala daerah itu tidak mungkin kosong ya, paling tidak untuk memenangkan Bupati atau Walikota dia harus punya paling tidak 25 sampai 50 milyar kalau Gubernur mungkin sekitar 100 sampai 500 milyar nah artinya ada perputaran uang disitu kan oleh karena itulah momentum pilkada juga disisi lain ini sebetulnya juga melahirkan efek pertumbuhan ekonomi itu sekalipun tidak signifikan. Nah tetapi kalau dibaca secara umum tentu kalau 2020 kita harus melihat keadaan sosial ekonomi masyarakat pada saat itu ya secara sosial kita dihadapkan pada situasi covid yang situasinya tidak seperti saat ini karena sudah mulai mereda kalau dulu kan memang kenapa civil society ini ramai-ramai menolak karena dikhawatirkan pemungutan suara itu berpotensi menjadi cluster baru munculnya titik-titik baru covid19 sehingga teman-teman ramai-ramai menolaknya, tapi kita lihat pemerintah dan mayoritas elite partai politik memaksakan supaya pilkada tetap terselenggara nah tapi secara umum

memang hasilnya kita sudah melihat pilkada sudah selesai relatif tidak ada masalah sekalipun masih ada catatan disana sini. Jadi kalau saya berpendapat bahwa memang pilkada sekali lagi lebih merefleksikan kehendak elite politik daripada kepentingan publik secara luas pada saat itu 2020, secara legal ya saya kira tidak ada masalah karena kan memang sudah ada payung hukumnya yang mengatur soal pergeseran tanggal itu Desember tanggal 9 itu.

4. Siapa saja aktor yang berpengaruh dalam penetapan kebijakan pilkada tahun 2020 selain Presiden?

Jawab : Tentu DPR ya, karena kewenangan itu ada pada DPR terutama di teman-teman komisi II yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi partai politik yang ada di parlemen semuanya sepakat untuk tetap melaksanakan pilkada ya saya kira tidak ada yang bisa membendung karena memang kewenangan itu ada di selain pemerintah kan DPR terutama fraksi-fraksi partai politik dan partai politik perlu diingat memang mereka jadi satu-satunya instrumen rekrutmen politik. Jadi mau masyarakat menolak setiap hari demo seratus kali ya kalau senayan tetap berkehendak jalan ya jalan jadi tidak ada yang bisa menghalangi mereka.

5. Seberapa besar pengaruh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah?

Jawab : Pengaruhnya cukup kuat ya, satu sisi memang pilkada berhasil menjaga sustainability kepemimpinan politik kepala-kepala daerah jadi

tidak perlu PJ tidak perlu kekosongan kepala daerah. Tetapi, sisi lain yang kemarin kita sayangkan tetap pilkada di era covid kalau kita bicara dalam konteks politik transaksional pilkada di era pandemi ini disisi lain justru melahirkan standar cost sendiri bagi para kandidat kepala daerah karena dalam situasi pandemi orang berharap terhadap sikap pemerintah dalam memberikan insentif yang bisa menolong mereka dalam situasi terganggu secara ekonomi. Hadirnya kandidat akan dilihat juga demikian, artinya begini masyarakat juga akan melihat oh ini momentum ya, momentum emas untuk mengerjain “kepala-kepala daerah atau kandidat kepala daerah” mumpung mereka nyalon kapan lagi kira-kira seperti itu. Jadi ini juga tidak bisa disalahkan begitu saja soal perspektif masyarakat yang melihat bahwa pilkada ini ya momentum emas juga untuk memperbaiki “gizi” dalam tanda kutip seperti itu, mungkin dengan melibatkan diri sebagai timses, melibatkan diri sebagai perangkat kampanye, dan lain sebagainya sehingga berpotensi mendapatkan aliran logistik itu.

6. Apa yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19?

Jawab : Pemerintah kita lihat sekalipun ditolak oleh mayoritas masyarakat sipil tetapi pelaksanaan pilkada di 2020 ini tetap harus dilihat untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan politik kepala-kepala daerah tadi. KPU saat itu dengan perangkatnya sampai kebawah merasa sangat yakin bisa melaksanakan pilkada sekalipun dengan cost yang cukup tinggi karena banyak anggaran yang terserap di perangkat atau alat prokes mulai

dari masker dan lain sebagainya yang sebetulnya itu kan komponen-komponen yang tidak perlu ada kalau pilkada dilaksanakan dalam situasi normal, tetapi pemerintah tetap kekeuh dan secara anggaran tidak ada masalah kemarin. Cuma yang kita sayangkan memang yaitu tadi lebih memaksakan diri atau mengambil kebijakan didasarkan pada kepentingan elite politik daripada kepentingan masyarakat secara umum.

7. Apa yang menjadi indkes keberhasilan dari suatu pemerintahan?

Jawab : Indeks keberhasilan dari pemerintahan saya kira banyak ya, tetapi yang paling prinsipil kan sebelum presiden terpilih dalam setiap kampanya kan mereka punya program sejauh mana program-program itu bisa di laksanakan pada saat mereka memegang kekuasaan. Nah sekarang tinggal kita lihat saja berbagai indikatornya kalau dulu pak Jokowi misalnya menyuguhkan program nawacita sekarang bagaimana kondisinya sampai sekarang ini, tentu indikator-indikator itu harus kita lihat secara objektif tidak bisa kita pukul rata kita harus by case dalam hal apa dulu kan seperti itu.

8. Apa yang menjadi catatan penting untuk Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama setahun pemerintahannya di tahun 2020?

Jawab : 2020 kan berarti masuk periode ke-2 setelah pak Jokowi di lantik, kalau tadi saya bilang banyak pr di bidang politik dan hukum, mesti ini harusnya menjadi catatan penting ya apalagi kan sekarang kita dihadapkan pada wacana penundaan pemilu. Tetapi secara umum kembali ke tahun

2020 kemarin dengan indikator atau pelaksanaan pilkada kemarin saya kira ini juga menjadi catatan tersendiri ya, memang kita melihat optimisme publik yang ingin dibangun. Jadi begini, pemerintah punya perspektif lain bagaimana menghadirkan pilkada ini sebagai instrumen untuk membangun optimisme dalam menyelesaikan pandemi, itu pesan yang ingin kita tangkap dari pemerintah. Tetapi, ekspektasi publik kan juga tidak sebatas itu tetapi adalah bagaimana pilkada di era pandemi ini bisa dilakukan secara lebih berkualitas, nah faktanya kan pilkada 2020 juga tidak jauh berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang penuh dengan catatan terutama dari sisi penguatan demokrasi misalnya terkait dengan politik transaksional, politik uang atau money politic, keberpihakan KPU, independen sikap KPU yang dipertanyakan dan sebagainya. Jadi saya kira tidak jauh berbeda antara pilkada 2020 dengan pilkada-pilkada yang sebelumnya, saya kira ini menjadi catatan penting dibidang hukum juga saya kira kita melihat kan pelemahan KPK secara kelembagaan dan sebagainya, kemudian kasus-kasus HAM yang belum tuntas secara maksimal kemudian indikator-indikator demokrasi seperti kebebasan berekspresi atau kebebasan sipil. Belum lagi juga pr-pr yang lain disektor energi, disektor ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial dan lain sebagainya ini juga sebetulnya juga masih banyak catatan. Kita masih menunggu ya pak Jokowi masih punya waktu sampai 2024 tentu kita berharap beliau meninggalkan delegasi yang baik atau mewariskan sesuatu yang baik bagi pemerintahan selanjutnya.

Transkrip Wawancara

Subjek : Arya Kharisma Hardy

Tanggal : 23 April 2022

Lokasi : Zoom Meeting (Online)

1. Bagaimana sejarah berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam?

Jawab : Berbicara terkait sejarah HMI, memang berangkat dari keresahan salah satu mahasiswa di daerah Yogyakarta sana kalau sekarang UII namanya kalau dulu Sekolah Tinggi Islam dimotori oleh Professor Lafran Pane dan ada sekitar 8 orang teman-temannya. Memang melihat kondisi pasca kemerdekaan kita pada saat itu melihat bahwa kelompok-kelompok islam yang tidak terintegrasi dan tidak terorganisir dengan baik dan disusul juga dengan persoalan budaya, budaya yang pada saat itu dianggap cenderung agak menjauh dengan nilai-nilai persoalan keislaman maka Lafran Pane dan 9 temannya itu mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam. Pada sejarah berdirinya dahulu memang juga terjadi beberapa penolakan-penolakan. Namun, semangat dari mahasiswa yang bernama Lafran Pane ini tidak pantang surut dan pada 5 Februari 1947 berdirilah Himpunan Mahasiswa Islam untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Memang terkait sejarahnya itu juga berangkat dari mengintegrasikan atau membuat satu

gerakan mahasiswa yang berlatar belakang islam ini menjadi satu gerakan yang kolektif berbicara tentang kebangsaan, keislaman, keindonesiaan.

2. Apakah yang menjadi Tujuan serta Visi Misi dari HMI dalam perjalanan organisasinya?

Jawab : Karena berangkat dari 2 konsentrasi persoalan itu, yaitu keislaman dan keindonesiaan. Secara tekstual tujuan HMI itu tercantum di dalam Anggaran Dasar HMI yaitu “Terbinanya Insan Akademis Pencipta, Pengabdian yang Bernafaskan Islam dan Bertanggung Jawab Atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur yang di Ridhoi Allah SWT”. Turunan dari tujuan tersebut sebenarnya secara status yaitu teman-teman yang tergabung ini memang mahasiswa, tentunya bagaimana organisasi ini itu hadir untuk mempertajam kapasitas, kemampuan, keilmuan dari mahasiswa tersebut baik sesuai dengan bidang keilmuan yang dia tempuh maupun juga modal-modal pada disiplin ilmu lainnya. Sehingga kader-kader HMI memiliki kemampuan yang cukup komperhensif untuk melihat berbagai persoalan dari berbagai macam perspektif. Dan disisi lain, diharapkan dari tujuan HMI yang tadi saya sebutkan juga mampu menciptakan berbagai lokasi sesudah itu mengkombinasikan sehingga melahirkan gagasan-gagasan baru dan tentunya juga menjadi pemecah kebuntuan persoalan yang ada di sekelilingnya, sekeliling kader HMI itu sebagai sosok yang mampu memecah kebuntuan di tengah berbagai persoalan yang hari ini multidimensional, dan tentunya semua gerak dan arah dari langkah-langkah kader HMI baik secara organisasi maupun

secara individu tetap harus berpegang pada persoalan nilai-nilai tentunya nilai-nilai keislaman dan semua itu juga bertitik tumpu pada persoalan bahwa terwujudnya masyarakat adil dan makmur itu juga menjadi tanggung jawab seorang kader HMI yang sering kita dengar itu kalau Gramsci bilang sebagai intelektual organik, yang kapasitas keilmuan serta pengalaman yang dia punya itu tidak hanya pada persoalan transfer ilmu pengetahuan tetapi lebih kepada pertanggung jawaban keilmuan tersebut bagi yang ada di sekeliling dan ruang lingkup masyarakat yang ada di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu kalau terkait persoalan dari tujuan Himpunan Mahasiswa Islam, tetapi rangkaian turunan dari tujuan-tujuan tersebut adalah untuk mengisi kemerdekaan diawali mempertahankan kemerdekaan dan meninggikan derajat umat Islam yang ada di Indonesia.

3. Peran penting apa yang di pegang oleh Himpunan Mahasiswa Islam dalam menjalankan fungsinya sebagai agent of social control?

Jawab : Kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang mutlak terkait dengan kekuasaan itu juga akan melahirkan dampak negatif dari kekuasaan itu sendiri. Seperti, abuse of power dan lain-lainnya. Oleh karenanya peran yang melekat pada mahasiswa selain agent of change, agent of social control, iron stock dan lain-lainnya itu memang harus diambil oleh mahasiswa peran tersebut dan walaupun dinamis ya pada periode-periode tahun-tahun sejarah yang kita sudah kita lalui tentunya naik turun. Tetapi, dalam konteks menjaga atau menjalankan peran HMI sebagai agent social control ini memang bisa kita lakukan dalam mungkin berbagai macam

manifestasinya dan bentuknya di lapangan. Ada semisalnya kalau dulu itu organisasi yang modern itu dianggap organisasi yang bisa melakukan yang namanya pengkaderan, sesudah itu mampu mengkonsolidir opini dan masa. Namun, hari ini seiring dengan perubahan sosial, perubahan teknologi juga tentunya kader HMI itu dipaksa untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang perubahannya itu cepat dan sulit dihitung arahnya yang orang sebut dengan Era Vuca ini. Apa yang sudah dilakukan teman-teman HMI selama ini yang berkaitan dengan Agent of Social Control ini salah satunya adalah transfer informasi melalui tulisan-tulisan yang dimuat di media sosial atau dengan melalui forum-forum diskusi, dan dengan menghadirkan berbagai macam pemateri yang multi dimensi sehingga mahasiswa dan masyarakat itu mampu mendapatkan informasi yang utuh sehingga kita mampu melahirkan satu kesimpulan bersama tentang berbagai persoalan yang ada di bangsa ini. Ataupun, dia (HMI) pada opsi terakhir sering kita sebut sebagai ultimum remedium. Obat terakhir yaitu turun ke lapangan menyampaikan aspirasi dan kritiknya terhadap berbagai persoalan yang ada di bangsa ini.

4. Sejauh mana keterlibatan HMI dalam merespon setiap aktivitas pemerintah di tahun 2020?

Jawab : Itukan masa-masa awal terkait pandemi Covid-19, nah HMI juga di sisi lain mengkritisi terkait pola dan cara pemerintah melakukan penanganan Covid-19. Namun di sisi lain juga teman-teman dari PB HMI itu juga melakukan kerja-kerja yang tentunya meringankan kerja

pemerintah, juga membantu masyarakat untuk sama-sama menghadapi persoalan Covid-19. Bisa dilihat di awal-awal dari pandemi covid mungkin di 2020an mungkin nanti bisa di cross check, pada saat itu tidak banyak organisasi-organisasi yang melakukan kegiatan terkait dengan penanganan covid. Tetapi disitu HMI adalah salah satu organisasi yang ada di Indonesia ini yang melakukan di awal itu tracing atau pencegahan awal, makanya pas waktu itu saya mengadakan rapid test gratis itu dokter-dokter umum rumah sakit pun banyak yang pada saat itu melakukan pengecekan di acara HMI yaitu pada saat itu di selenggarakan di Sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Di sisi lain juga banyak muncu persoalan pada masalah kedaulatan ekonomi di wilayah BUMN, kita waktu itu mengkritisi terkait persoalan Jiwasraya yang kita kejar terus menteri BUMN itu untuk melakukan perapihan terhadap BUMN-BUMN yang ada sehingga hadirnya BUMN itu justru mensupport bukan menjadi beban negara tersendiri, yang kalau kita compare sebenarnya di berbagai negara di dunia yang menganut sistem demokrasi itu sebenarnya jarang yang memiliki BUMN. Negara-negara yang punya BUMN itu lebih kepada negara-negara yang sifatnya d bisa dibilang tersentral kekuasaannya atau orang sebut dengan otoriter. Kritikan-kritikan kita itu selalu kita buat di publik sehingga menjaga semangat menteri terkait juga untuk tetap berjuang merapihkan kerjaan-kerjaanya, itu terkait jiwasraya. Dan kita juga pada saat itu meminta kepada menteri BUMN untuk bisa menyelesaikan terkait kedaulatan pada wilayah kesehatan kita,

karena pada saat itu kita itu bertumpu pada luar, bertumpu pada impor-impor barang kesehatan dari luar negeri. Responnya cukup baik memang pada saat itu menteri Erick Tohir itu langsung berbicara tentang produk-produk medis dalam negeri. Juga kami pada saat itu berbicara persoalan tenaga kerja asing yang cukup meresahkan di masa pandemi yang mana tenaga kerja kita di dalam negeri sekian juta itu jobless, sekian juta itu berhenti bekerja, di sisi lain ada mobilisasi dari luar masyarakat dunia yang masuk ke Indonesia pada saat itu kalau tidak salah dari China yang masuk ke Kalimantan. Makanya ada satu statement saya di beberapa media pada saat itu saya lihat cukup ramai di respon oleh masyarakat, bisa saya lihat dari pembacanya dan komentar-komentarnya terkait persoalan itu, saya sampaikan begini pada saat itu “kera dihutan disusui, anak sendiri dirumah mati kelaparan”, nah itu ramai dan ribuan orang yang share berita itu. Sehingga pada saat itu sempat diredam, sempat berhenti. Namun, pasca dari situ sempat masuk kembali dengan jumlah-jumlah yang sebenarnya pun rilis dari pemerintah juga tidak terbuka berapa jumlahnya, inikan juga menjadi persoalan dan cukup melukai hati masyarakat Indonesia di tengah kita sedang menghadapi pandemi Covid-19. Juga pada saat itu kalau tidak salah menjelang pesta demokrasi di 2020 berbicara juga tentang kepala-kepala daerah yang terlibat dengan kasus narkoba dan lagi juga merupakan persoalan dunia maka kita juga mengkritisi persoalan tersebut, dan yang lainnya saya ingat itu saya sempat hampir 2-3 minggu saya ngerunning tentang persoalan harga BBM yang melambung tinggi

pada saat itu, jadi seperti pukulan combo pada saat itu disisi lain kita dihadapkan dengan tantangan kesehatan yang turunannya adalah persoalan lapangan kerja, turunannya itu juga menjepit ekonomi kita. Di sisi lain juga masyarakat juga di timpa kembali dengan naiknya harga BBM, waktu itu sempat beberapa kali saya samapaikan dengan angle yang soft dan baik saya meminta Presiden untuk memenuhi janjinya terkait penurunan harga BBM karena beliau sempat berstatement kalau tidak salah nanti mungkin bisa di cek di media-media. Kurang lebih yang saya ingat itu terkait respon-respon dan kritik-kritik PB HMI di 2020, namun memang yang paling kontras adalah pada saat itu kita meminta bagi para pemenang pilkada tidak bereuforia dalam wujud pengerahan masa, karena kita menjaga persoalan dari tantangan Covid-19 dan anjuran pemerintah pada saat itu.

5. Bagaimanakah pandangan HMI terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19?

Jawab : Terkait pelaksanaan pilkada serentak pada saat itu PB HMI dalam posisinya itu tidak menolak, namun juga kita justru menyarankan kepada pemerintah untuk dapat melakukan pencegahan-pencegahan dini agar proses demokrasi itu dapat berjalan dengan lancar. Kenapa pada saat itu PB HMI tidak melakukan penolakan atas pilkada serentak di 2020 yang hari itu juga di laksanakan di masa pandemi, saya sempat juga melihat atau mendapatkan data walaupun data itu susah untuk kita cari di 2019 itu angka mortalitas di Indonesia itu 1,7 namun dari Januari sampai Mei

angka kematian kita itu diangka 600 belum setengah dari tahun 2019. Itulah compare kami maka lihat persoalan pandemi di waktu itu tidak terlalu berdampak pada angka mortalitas di Indonesia per Januari sampai Mei karena kebelakangan angka-angka kematian mortalitas yang utuh sulit untuk di akses, yang saya dapatkan itu di jakarta. Beberapa bulan di tahun 2019, dibulan April atau Mei dengan bulan yang sama di 2020 di masa pandemi ternyata itu pada bulan-bulan itu turun. Ini yang kami lihat bahwa kami hitung pada saat itu tidak mempengaruhi angka mortalitas. Misalnya sebelum pandemi di jakarta kalau di rata-rata angka kematian itu sekiatr 4000an dan tidak ada pandemi, di bulan-bulan pandemi itu turun. Itulah menjadi kesimpulan kami bahwa ketika hari itu tidak mempengaruhi angka mortalitas makanya ini bisa jadi satu obat di masyarakat karena ini pesta demokrasi juga akan memompa persoalan perekonomian dengan ada yang cetak baju, cetak banner segala macam itu akan mendorong pergerakan ekonomi, sehingga pada saat itu HMI lebih mencegah kepada persoalan misalnya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan dan pada saat itu kami mengundang Mendagri, Ketua Komisi II, Bawaslu RI, dan KPU RI kami undang. Kami berdiskusi disitu tentang persoalan pilkada di tengah pandemi ini dan setelah saya mendengar dan juga saya menyampaikan beberapa data dan informasi yang saya punya, saya meminta pada saat itu untuk bisa melakukan kanalisasi atau tindakan-tindakan preventif untuk mengurangi penyebaran covid pada saat itu. Itu kalau terkait pilkada posisi PB HMI pada saat itu, kita tidak menolak

tetapi kita lebih kepada memberikan pandangan dan meminta kepada pemerintah untuk membuat rules atau pagar supaya untuk diatur sedemikian rupa meminimalisir proses penyebaran Covid-19 dan itu juga kita ukur atau compare dengan persoalan angka mortalitas. Cukup sulit memang pada saat itu untuk di cari, karena yang muncul itukan data kematian 50, 30 seperti itu. Misalnya, perhari ini 20 orang yang meninggal karena pandemi covid padahal kalau teman-teman compare dengan 2019 itu 1,7.

6. Bagaimana pandangan HMI akan adanya perbedaan pandangan yang terjadi di masyarakat akibat kebijakan pilkada tahun 2020?

Jawab : Kita hidup di alam demokrasi, terkait perbedaan pandangan itu sesuatu yang akan terus terjadi. Oleh karenanya tentunya kita menyikapinya sebagaimana kita sebagaimana masyarakat atau warga negara yang secara mekanis negar aini di gerakkan dengan sistem demokrasi, kita hanya menyampaikan pandangan-pandangan kita di media juga melalui forum-forum diskusi, ini juga bagian dari mensikapi perbedaan pandangan terkait penyelenggaraan pilkada di masa pandemi pada saat itu. Cuma balik lagi kita juga sudah coba mengukur semaksimal mungkin walaupun hitungannya juga berbasis data kebelakang, karena kita juga hanya menerka-nerka dengan informasi data yang kita punya sebelumnya. Tetapi itu hal yang wajar di negara demokrasi itu hal yang wajar, namun prinsipnya pada saat itu kita terus mendukung keputusan

DPR dan pemerintah untuk melakukan pencegahan pada penyelenggaraan pesta demokrasi di 2020.

7. Apa sikap yang dilakukan HMI sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah terkait kebijakan pilkada tahun 2020?

Jawab : Kita lebih kepada pencegahan, meminta pemerintah untuk melakukan dengan terukur dan teratur mengenai sistem pelaksanaan yang berkesesuaian dengan kondisi pada hari itu yaitu di masa pandemi. Kita juga mengumpulkan berbagai stakeholder untuk duduk bersama dan saling bertukar pandangan atas tantangan yang akan kita hadapi bersama di 2020. Kita lebih kepada wilayah transfer informasi pandangan-pandangan terkait persoalan pilkada dan pandemi di 2020 tersebut.

8. Bagaimana cara HMI dalam mengontrol kondisi di masyarakat agar tetap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah?

Jawab : Berbicara sosial ini kan juga berbicara mengenai sumber daya manusia, berbicara tentang arus informasi yang masuk. Teman-teman HMI lebih kepada melakukan sosialisasi di daerah dengan struktur HMI ada Kohati ada teman-teman yang lain juga teman-teman di LK HMI yang terus melakukan kerja-kerjanya dengan menyebarkan misalnya hal-hal yang berkaitan tentang kesehatan. Sehingga informasi yang kita drop ke masyarakat ini sebagai satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mensikapi dan menghadapi kebijakan pemerintah pada saat itu, karena kita ketahui bersama berbicara demokrasi tentunya kan kita

berbicara tentang sumber daya manusia karena berawal dari kepala-kepala tiap warga masyarakat yang ada di Republik Indonesia. Makanya kita selalu masuk kepada persoalan transfer-transfer informasi dan sosialisasi tentang penanganan pandemi covid. Itu yang saya taruh di depan kemarin tim dari LK HMI pada saat itu.

9. Apakah cara yang dilakukan HMI dalam mengontrol kondisi sosial di masyarakat berhasil?

Jawab : Saya lihat dalam beberapa wilayah apa yang dilakukan teman-teman inikan sebenarnya beriringan dengan apa yang dikerjakan pada pemerintah pada saat itu. Pada akhirnya juga kita melalui tahapan pesta demokrasi itu juga menurut saya juga tidak teralu buruk dan proses regenerasi kepemimpinan di tiap daerah itu juga dapat berjalan dengan baik, karena berbicara suatu negara yang menghadapi tantangan kesehatan kita juga tidak bisa menampikkan dimensi-dimensi lainnya. Terutama kesehatan ini berkaitan dengan ekonomi juga berkaitan dengan efektivitas dan kerja keras pemerintah pusat maupun daerah-daerah, daerah-daerah inilah yang dihasilkan melalui proses pilkada kemarin ini juga dianggap sebagai satu energi baru untuk menghadapi tantangan besar bersama kita ini yaitu Covid-19.

10. Sejauh mana tingkat keberhasilan HMI dalam mempengaruhi pemerintah untuk tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan masyarakat?

Jawab : Dalam beberapa hal respon teman-teman HMI dan kita juga menggalang kawan-kawan yang lain itu direspon dengan baik, misalnya tentang persoalan kedaulatan kesehatan itu tadi saya bilang, kedaulatan alat medis kita, kita mampu menghasilkan alat medis kita sendiri, juga persoalan respon dari pemerintah Menteri BUMN tentang perapihan BUMN yang pada saat itu berkaitan dengan jiwasraya juga direspon dengan sangat baik. Tetapi dalam beberapa hal juga tetap pemerintah melakukan skema dan putusannya. Seperti contoh misalnya waktu itu kenaikan harga BBM, kenaikan harga BBM itu selalu kita tekan untuk pemerintah tidak menaikkan pada saat itu cuma range waktunya saja. Mereka juga menghitung tentang kekuatan ekonomi negara mereka imbangi dengan persoalan harga minyak dunia pada saat itu, walaupun turun tetapi itu ada rentang waktunya ini juga berkaitan tentang harga minyak dunia. Kita dalam kondisi tertentu hanya bisa melakukan kritik, menyampaikan saran dan pandangan yang hasil kajian dari teman-teman yang ada di HMI juga dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat yang bisa kita lihat beredar di media sosial maupun media elektronik lainnya yang bisa kita tarik sebagai satu simpulan dini, kita support juga dengan diskusi-diskusi di internal HMI pada saat itu.

Transkrip Wawancara

Subjek : Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si.

Tanggal : 30 Agustus 2022

Lokasi : Universitas Nasional

1. Mengapa Pemerintah menetapkan tanggal 9 Desember sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada? Mengapa tidak tanggal lainnya?

Jawab : Tentu tidak lain bagaimana pada kesiapan perangkat penyelenggara di daerah masing-masing dan menyangkut 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Terutama baik kesiapan penyelenggara, pengawas, maupun kesiapan peserta dalam hal ini adalah pasangan calon terkait kondisi kita masih menghadapi pandemi, sampai dianggap relatif aman maka barulah diputuskan pada 9 Desember dan tentu tidak mungkin juga berlama-lama dengan bersama-sama menjaga proses pada akhirnya semua bisa berjalan relatif baik dan hasilnya juga menggembirakan kemudian kita juga berhasil mempertahankan stabilitas dari siklus penyelenggaraan pemerintah daerah. Meskipun, kita menghadapi pandemi yang luar biasa, ini suatu prestasi untuk semuanya terutama untuk penyelenggara, KPU, KPUD dan pemerintah memberikan apresiasi yang luar biasa dan berterima kasih pada seluruhnya kepada peserta dan tentu juga masyarakat yang benar-benar sadar akan pentingnya menjaga proses. Walaupun satu atau dua ada mengalami kasus

saya kira itu wajar karena tidak ada yang sempurna tetapi hal tersebut segera diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pada saat itu.

2. Tujuan utama apa yang ingin dihasilkan pemerintah dari pelaksanaan Pilkada tahun 2020?

Jawab : Pemerintah berpegang pada asas demokrasi, asas yuridis. Karena menegakan demokrasi itu ada regulasinya. Siklus mekanisme, siklus konstitusional yang dalam pilkada 5 tahun sehingga kalau hal tersebut ditunda-tunda akan menimbulkan hal yang kurang baik bagi legitimasi pemerintahan. Serta memberikan kepastian hukum dan kepastian status pemerintahan sehingga semua program dapat berjalan dengan baik, tentu dimanapun tidak ada pemerintah yang memiliki niat jahat pasti memiliki niat yang baik. Tetapi, satu keyakinan bahwa pemerintah beritikad baik, pemerintah punya tanggung jawab berpegang pada peraturan perundangan untuk menyelenggarakan pilkada pada waktunya sehingga siklus mekanisme kepemimpinan dan pemimpin yang diteliti dari calon pasangan daerah terpilih secara demokratis, jujur, adil, dan legitimatif.

3. Dari hasil pelaksanaan Pilkada tahun 2020, apakah tujuan yang ditetapkan pemerintah sudah tercapai?

Jawab : Kita berbicara soal keberhasilan penyelenggara pemilu, ukuran keberhasilan itu pertama adalah keamanan dan ketertiban. keamanan sudah, ketertiban sudah, tepat waktu sudah, terpilihnya pemimpin yang pada umumnya merupakan orang-orang yang terpilih secara demokratis dan sudah

melalui proses seleksi sesuai dengan peraturan perundangan melalui pasangan calon kepala daerah dan juga ada yang calon independen. Dari ukuran itu pemerintah memandang bahwa pelaksanaan pilkada yang lalu relatif baik dan stabilitas pemerintahan seperti yang sampai hari ini terjaga dengan baik. Pemilih rata-rata diatas 60% sehingga partisipasi masyarakat juga tinggi walaupun menghadapi situasi yang luar biasa pada waktu itu.

4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penetapan tanggal pasti pelaksanaan Pilkada tahun 2020?

Jawab : Penetapan tersebut tidak serta merta kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Presiden telah mendelegasikan melalui asas dekonsentrasi kepada menteri dalam negeri mempunyai tugas untuk melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR karena atas dasar itu Komisi II DPR mengundang KPU RI, Bawaslu RI disitulah dilakukan rapat kerja dan rapat kerja tersebut menghasilkan keputusan-keputusan yang telah melalui diskusi yang panjang. Sehingga pelaksanaan Pilkada itu adalah keputusan bersama para stakeholder dalam pemerintah yang di endorse oleh pemerintah, itulah inisiatif pemerintah dengan menghormati semua stakeholder baik legislatif, DPR RI Komisi II khususnya, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas.

5. Kapan waktu pembahasan antar lembaga dilakukan dalam menetapkan waktu pelaksanaan pilkada? Apakah sekali atau dilakukan beberapa kal pembahasan?

Jawab : Yang saya tahu itu sudah beberapa kali dilakukan pertemuan, dilakukan rapat kerja dan sebelum rapat kerja dilakukan rapat dengan pendapat umum dengan masyarakat boleh menyampaikan pandangan-pandangannya kepada Komisi II tetapi pengambilan keputusan tersebut berada pada rapat pleno komisi dengan melibatkan seluruh stakeholder penyelenggara pemilu. Sehingga tentu bukan hanya sekali bahkan sebelum itu wacana sudah berkembang disurat kabar, KPU menyampaikan pandangan, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri, serta dari pakar-pakar politik tentu itu semua merupakan aspirasi yang ditangkap juga oleh pemerintah. Pemerintah mengambil inisiatif untuk merumuskan pelaksanaan Pilkada.

6. Apakah pemerintah sudah menyiapkan atau telah memiliki pedoman protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 karena pelaksanaan Pilkada?

Jawab : Tentu sudah, Karena Kementrian kesehatan juga berkali-kali mengadakan pertemuan khusus dan rapat koordinasi teknis antara Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, dan KPU tentang bagaimana penyelenggaraan protokol kesehatan bahkan hasil kesepakatan itu dituangkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam regulasi-regulasi khusus yang

dibuat oleh KPU bagaimana standar minimal dari penyelenggaraan protokol Covid-19 dalam rangka pelaksanaan pilkada.

7. Bagaimanakah pandangan pemerintah melihat kondisi masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerahnya sehingga memantapkan pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020?

Jawab : Tingkat kegawatan dan kerawanan Covid-199 berbeda-beda, pemerintah melalui kementerian kesehatan tentu punya data. Di Sumatera tentu tidak sama dengan di Jakarta, pada umumnya kalau kami perhatikan kerawanan Covid-19 lebih di daerah kota-kota besar yang merupakan kota metropolitan, tetapi kalau diluar daerah seperti misalnya sebut saja di Kabupaten Puncak Jaya di Papua sana itu lebih rendah penyebarannya. Karena penyebaran Covid-19 itu lebih mudah terjadi di tempat perkumpulan orang yang tertutup, kalau di tempat terbuka relatif lebih aman karena danya sirkulasi udara, sedangkan kehidupan orang kota itu lebih banyak terjadi di Mall, Perkantoran, sehingga Covid-19 lebih tinggi di kota-kota besar dan diluar sana jauh lebih rendah. Itulah dasar kenapa pemerintah beserta stakeholder lainnya menteapkan tanggal 9 Desember sebagai pelaksanaan Pilkada.

8. Peran penting apa yang dipegang oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam kebijakan Pilkada tahun 2020?

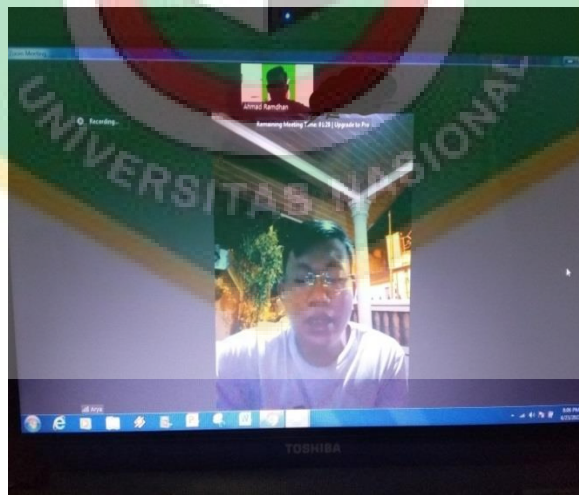
Jawab : Dewan Pertimbangan Presiden sesuai dengan undang-undang tugas pokoknya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kami di Wantimpres pada waktu itu tentu juga melakukan sejumlah

pertemuan, kami mengundang KPU, Menteri Dalam Negeri, Bawaslu, dan kami juga mengundang beberapa LSM pegiat pemilu dan juga beberapa tokoh secara bergantian. Itu kami mendapatkan pandangan dan pemikiran yang betul-betul komprehensif dan menyelesaikan jangan hanya kritis tetapi tidak dapat menyelesaikan. Di pemerintahan yang terpenting adalah menyelesaikan bukan hanya sekedar kritis, lalu atas dasar itu kami telah memiliki sejumlah bahan, disitulah kami membuat apa yang kira-kira layak disampaikan kepada Presiden. Itulah yang disebut produk kami sebagai nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, atau disingkat dengan nastim. Nastim ini ada yang bersifat kolektif dan ada yang bersifat perseorangan, kekuatan nastim kolektif dan perseorangan itu sama kuatnya sehingga kami atas masukan-masukan memberikan nasihat kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Nasihat Dewan Pertimbangan Presiden tidak boleh sama dengan Kementrian, sama dengan BIN dan dengan yang lainnya, kami mengisi ruang-ruang kosong diantara yang kami undang. Di KPU terjadi kekosongan apa itu yang kami infokan kepada Presiden untuk kemudian Presiden mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Soal Presiden menginstruksikan kepada menpolhukam atau mendagri itu adalah hak Presiden, dan nastim itu rahasia tidak boleh diumumkan kepada publik hanya Presiden saja yang mengetahui, para anggota dan sekretarisnya, dan saya terikat janji sumpah jabatan tidak boleh membuka itu. Tetapi proses untuk menyusun nastim itu terbuka dan jika sudah sampai ke Presiden itu hal yang tertutup.

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Wawancara dengan Yusa Farchan, S.Sos., M.Si
Pengamat Politik Citra Institute



Gambar 2 Wawancara dengan Arya Kharisma Hardy
PJ Ketua Umum PB HMI 2018-2020 via Zoom Meeting



Gambar 3 Wawancara dengan Dr. Drs Ganjar Razuni, S.H., M.Si
Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia



BIODATA PENULIS

Ahmad Ramdhan adalah seorang putra dari Bapak H. Jayadi dan Ibu Hapsoh yang lahir di Kota Depok pada tanggal 21 Juni 2000. Adan adalah sapaannya sehari-hari dan Adan bersekolah mulai dari TK Ar-Rahmah dan melanjutkan di SDN Pondok Cina 4 setelah itu masuk di SMP Islam Al-Muhajirin dan melanjutkan sekolah tingkat atas di SMA PGRI Depok baru kemudian melanjutkan studi pada perguruan tinggi di Universitas Nasional dengan Program Studi Ilmu Politik.

Sejak duduk di bangku SMA Ahmad Ramdhan aktif di berbagai organisasi mulai dari Anggota Osis SMA PGRI dan menjadi Ketua (Pradana) Pramuka SMA PGRI hingga menjadi Anggota Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Pancoran Mas Kota Depok Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan masa bakti 2018-2022. Ahmad Ramdhan juga pernah menjadi pelatih Pramuka pada tingkat siaga dan penggalang di beberapa sekolah seperti SD Holy Faithful Obedient, SDN Pancoran Mas 2, dan SDN Kalimulya 3.

Pada tingkat perguruan tinggi Ahmad Ramdhan menjadi Kader dari Himpunan Mahasiswa Islam pada tahun 2019 dan menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Masa Bakti 2020-2021 Pada Divisi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Biro Sosial Masyarakat.

Skripsi Ahmad

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	alfarisyi10.blogspot.com Internet Source	1%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
3	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	1%
4	ejournal.hmi-gowaraya.org Internet Source	1%
5	qdoc.tips Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
7	www.edukasinesia.com Internet Source	<1%
8	nasional.kompas.com Internet Source	<1%
9	hmitarbiyahptk.blogspot.com Internet Source	<1%